

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan alat yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan perkembangan suatu bangsa. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat utama dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa yang maju dan kuat, merupakan bangsa yang memiliki proses pendidikan yang utuh dan baik. Terselenggaranya Pendidikan yang baik dan bermutu, tidak lepas dari proses pembiayaan yang baik pula. Salah satu langkah pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang baik, dengan diselenggarakannya program bantuan operasional sekolah, dengan maksud dan tujuan agar terciptanya pelayanan dan terciptanya pendidikan yang berkualitas. Pembiayaan pendidikan yang dilakukan pemerintah, lewat dana bantuan operasional sekolah, merupakan salah satu langkah strategis untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik.

Undang-undang Nomor Tahun 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat tiga menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang di selenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Mengacu dari undang-undang tersebut, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta

didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Searah dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan langkah-langkah reformasi atau menyempurnakan sistem pendidikan yang meliputi : (1) Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan sertamengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik sehingga terjadi pergeseran paradigma proses pendidikan dari paradigma pengajaran keparadigma pembelajaran, Paradigma pengajaran yang menitikberatkan peran pendidik dalam menstranformasi pengetahuan bergeser keparadigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya, (2) Perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumbernya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subyek pembangunan secara utuh.

Melihat tanggung jawab pemerintah yang begitu besar terhadap pendidikan, serta masih banyaknya masyarakat indonesia yang belum mampu menjangkau biaya pendidikan, mendorong pemerintah untuk melaksanakan suatu program yang dapat membantu masyarakat untuk merasakan pendidikan secara merata dan menyeluruh. Program pemerintah yang berupa dana operasional sekolah (BOS) merupakan salah satu program yang di harapkan mampu untuk

menuntaskan segala permasalahan yang ada dalam pendidikan, diantaranya ialah angka partisipasi kasar (APK) SD dan SMP.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di mulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar belajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Namun dengan adanya kebijakan dana BOS ini bukan berarti turut berhentinya permasalahan pendidikan di Indonesia, dalam kenyataan yang terjadi, masih dapat kita temukan berbagai kendala dalam penyaluran dan realisasi dana BOS. Berbagai masalah muncul terkait dengan adanya berbagai kasus penyelewengan dana BOS, dan mengenai ketidakefektifan pengelolaan dana BOS oleh pemerintah.

Sebanyak 4.12% sekolah tidak menggratiskan biaya operasional sekolah pada siswa didiknya. Dari 4.127 sekolah di 62 kabupaten/kota, diperoleh 47 SD (27 SD Negeri dan 20 SD Swasta) dan 123 SMP (95 SMP Negeri dan 28 SMP Swasta) di 15 kabupaten/kota belum membebaskan biaya/iuran bagi siswa tidak mampu di sekolah dan tetap memungut iuran/biaya pendidikan seperti iuran ekstra kurikuler, sumbangan pengembangan sekolah, dan iuran komputer kepada siswa. Dana BOS sebesar Rp28.14 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya

(indikasi korupsi). Fakta dilapangan, dari hasil sampling 4127 sekolah terdapat 2054 sekolah (sebesar 49,79%) penerima dana BOS menyalahi penggunaan dana BOS sebesar Rp 28.14 miliar dengan sebagai berikut: 1) Biaya transportasi kegiatan rekreasi kepala sekolah dan guru. 2) Uang lelah kepala sekolah. 3) Biaya pertemuan hari ulang tahun yayasan (biasa terjadi di sekolah swasta yang dikelola yayasan. 4) Dana BOS digunakan untuk membeli laptop, PC desktop, flash disk, dan peripheral komputer lainnya yang tidak terkait langsung dengan murid. 5) Membeli peralatan yang tidak berkaitan langsung dengan murid seperti dispenser, TV, antena parabola, kursi tamu di ruang kepala sekolah, lemari, dan lain-lain. 6) Pembelian voucher hand phone, pemberian uang duka dan karangan bunga acara pisah sambut kepala dinas, pembelian note book dan PC desktop. 7) Melakukan rehab gedung sekolah yang termasuk dalam rehab sedang atau berat. 8) Biaya honor dan transportasi guru untuk kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya seperti LPMP, SKB, dan Pemda. 9) Dana BOS dipinjamkan sementara untuk membiayai honor guru bantu atau honor guru tidak tetap yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. 10) Biaya partisipasi HUT Kota/Kabupaten (mengikuti parade HUT kota atau kabupaten). 11) Biaya konsumsi guru dari pagi s.d. siang hari (selain biaya teh, gula, dan kopi seperti diperbolehkan dalam juklak) (Wawasan 2007, dalam Karding 2008).

Dengan menggunakan uji sampling (uji petik) 4127 dari sekitar 200 ribu sekolah, maka dana BOS yang tidak digunakan sesuai peruntukan dalam operasional sekolah mencapai Rp 1.4triliun. Buku dana BOS buku sebesar

Rp562.4 juta tidak sesuai dengan buku panduan BOS (indikasi korupsi) dan senilai Rp656.7 juta belum/tidak dapat dimanfaatkan. Dari sampling 4127 SD/SMP di 62 kabupaten/kota, terdapat 134 sekolah di 14 kabupaten/kota senilai Rp 562.4 juta yang menggunakan dana BOS buku untuk membeli buku-buku pelajaran yang tidak sesuai dengan juknis BOS buku. Secara statistik, angka penyalahaan BOS buku ini setara dengan Rp 25 miliar untuk sekitar seluruh SD/SMP di Indonesia. (2. Terjadinya indikasi korupsi sebesar Rp 2.41 miliar dana safeguarding Dalam pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan dana safeguarding (Wawasan 2007, dalam Karding 2008).

Terkadang sistem yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terkait dana BOS ini pun turut menjadi bumerang dan sering menghadirkan berbagai masalah baru. Pada tahun 2012 dana BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dana. Pada tahun anggaran 2011 penyaluran dana BOS dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah kabupaten/kota dalam bentuk dana penyesuaian untuk BOS, mulai tahun anggaran 2012 dana BOS disalurkan dengan mekanisme yang sama tetapi melalui pemerintah Provinsi.

Kelemahan yang cukup signifikan dalam hal pengelolaan dana BOS di sekolah adalah kurangnya tingkat efisiensi dalam proses pengalokasian dana BOS. Hal ini bisa terjadi, kemungkinan terbesar diakibatkan oleh tidak jelasnya orientasi penganggaran dana pendidikan pada tingkat sekolah. Program-program yang direncanakan oleh sekolah kurang memiliki relevansi dengan tujuan dan semangat digulirkannya dana BOS, yakni membuka ruang yang sebesar-besarnya bagi akses pendidikan yang murah dan bermutu. Inefisiensi menjadi sesuatu yang

logis manakala proses penganggaran di sekolah lebih bersifat insidental, dibanding harus mengacu pada desain dan tahapan proses pembelajaran yang paling layak dibiayai.

Berdasarkan hasil observasi awal yang di lakukan di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan dana BOS di 14 Sekolah dasar (SD) se kecamatan Totikum, telah berjalan dengan baik dan mengacu pada juknis yang ada. Hasil observasi lainnya yang dilakukan di lapangan menunjukkan terdapat beberapa kelemahan yang ditemukan dalam pengelolaan dana BOS terutama yang terkait dengan mekanisme yang di lakukan sekolah dalam pengelolaan dana BOS.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah ditemukan bahwa banyak hal-hal yang diinginkan sekolah untuk dilaksanakan namun selalu bertentangan dengan juknis yang ada, sehingga menjadi kendala bagi sekolah. Dari hasil wawancara lainnya menyebutkan bahwa, dalam pemanfaatan dana BOS, pihak sekolah sering mengalami kendala yang di akibatkan oleh minimnya akses informasi dan komunikasi.

Hal ini dapat terlihat dari hasil pengamatan awal bahwa pengelolaan dana BOS belum dilaksanakan secara optimal, mengingat masih banyak hambatan yang ditemui oleh pihak sekolah dalam implementasi dana BOS, diantara masalah yang ada yaitu, tidak adanya layanan listrik pada siang hari dan tidak tersedianya jaringan komunikasi. Realitas ini pula yang menyebabkan kendala bagi sekolah untuk memanfaatkan dana BOS dengan baik. Disamping itu, menurut hasil pengamatan lain, sekolah tidak memiliki tolak ukur keberhasilan pengelolaan BOS karena kurang dilibatkan dalam proses evaluasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tergugah untuk melakukan satu penelitian yang diformulasikan dengan judul “*Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Sekolah Dasar (Sd) se Kecamatan Totikum, Kab. Bangkep*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul yang di ambil dan latar belakang masalah maka yang menjadi masalah pokok adalah: .

1. Bagaimanakah penggunaan dana BOS di SD se Kecamatan Totikum?
2. Bagaimanakah pemanfaatan pembiayaan dana BOS di SD se Kecamatan Totikum?
3. Bagaimanakah monitoring evaluasi dana BOS di SD se kecamatan Totikum?
4. Bagaimanakah tingkat ketercapaian tujuan penggunaan dana BOS di SD se kecamatan Totikum?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui program penggunaan dana BOS di SD se Kec. Totikum.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan pembiayaan dana BOS di SD se Kec, Totikum.
3. Untuk mengetahui monitoring evaluasi dana BOS di SD se Kec, Totikum.

4. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan penggunaan dana BOS di SD se  
Kec. Totikum.

#### **D. Manfaat Penulisan**

1. Sebagai bahan acuan semua pihak, utamanya bagi mereka yang hendak  
melakukan penulisan yang sama dan topik permasalahan yang sama.
2. Untuk dapat mengetahui proses Pemanfaatan dana BOS dengan baik,  
khususnya di sekolah dasar se Kec. Totikum, Kab. Bangkep